

365/S1/FH/UNIKU/SKR/2025

**PENERAPAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KABUPATEN KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

MIFTAH PARIDZ

NIM. 20211410048



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN**

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun Oleh :

MIFTAH PARIDZ

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 24 Juni 2025

Pebimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Pebimbing II



Gios Adhyaksa S.H., M.H.
NIK. 41010788148

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah S.H., M.H
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENERAPAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN KUNINGAN

Disusun Oleh :

MIFTAH PARIDZ

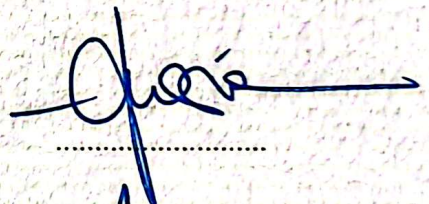
Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 24 Juni 2025

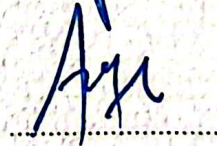
Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142



Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

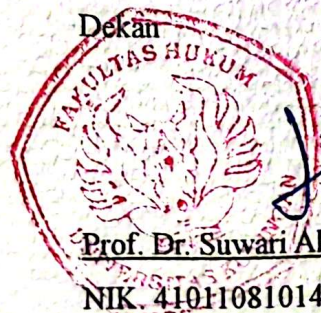


Penguji III : Anthon Fathanudien SH MH
NIK. 41010879147



Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dekan

Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142


Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MIFTAH PARIDZ
NPM : 20211410048
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan)

Kuningan, 24 Juni 2025
Pembuat Pernyataan



MIFTAH PARIDZ

ABSTRAK

Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan, MIFTAH PARIDZ, Nim. 20211410048, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kuningan.

Maraknya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda, termasuk di Kabupaten Kuningan. Anak sebagai pelaku berada pada posisi rentan sehingga diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan. **Rumusan masalah** penelitian ini (1) bagaimana pengaturan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dan (2) bagaimana penerapannya di Kabupaten Kuningan. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan penerapan kewenangan tersebut. **Metode** yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kasus yang ditangani Polres Kuningan. **Hasil penelitian** pertama, secara normatif kewenangan kepolisian diatur dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 29 dan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 7 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan perlindungan anak dan keadilan restoratif. Kedua, dalam penerapannya masih ditemukan hambatan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya pelatihan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, seperti: R (17) dikenakan Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 (psikotropika); T (16) dikenakan Pasal 196 dan/atau 197 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 (obat keras tanpa izin); dan L (15) dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 (narkotika golongan I). Semua kasus ditangani dengan pendekatan represif, belum sepenuhnya sesuai prinsip keadilan restoratif. **Kesimpulan** Pengaturan kewenangan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika sudah jelas dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2002 dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan menekankan keadilan restoratif. Namun, di Kabupaten Kuningan penerapannya belum optimal, masih dominan pendekatan represif, serta koordinasi antar lembaga belum berjalan efektif. **Saran** Pengaturan perlu disosialisasikan lebih luas agar aparat memahami dan menerapkan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penerapan, dibutuhkan pelatihan rutin, sinergi antar lembaga, serta edukasi hukum masyarakat melalui forum peduli anak di tingkat desa.

Kata kunci: Kewenangan Kepolisian, Anak, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

The Police Authority in Law Enforcement Against Children as Perpetrators of Narcotics Crimes in Kuningan Regency. By MIFTAH PARIDZ, Student ID. 20211410048, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan.

The rampant involvement of children in narcotics crimes poses a serious threat to the future of the younger generation, including in Kuningan Regency. Children as perpetrators are in a vulnerable position, thus requiring a legal approach that is not only repressive but also considers aspects of protection and rehabilitation. The problem formulations of this research are (1) how the police's authority is regulated in law enforcement against child perpetrators of narcotics crimes, and (2) how it is applied in Kuningan Regency. The objectives of this research are to analyze and to determine the regulation and application of this authority. The method used is empirical legal research with a juridical-empirical approach through interviews, observation, and documentation studies of cases handled by the Kuningan Police. The research results show, first, that normatively, police authority is regulated in Law No. 2 of 2002 Article 29 and Law No. 11 of 2012 Article 7 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which emphasizes child protection and restorative justice. Second, in its application, obstacles are still found such as limited human resources, lack of training, and weak coordination between institutions. This is evident in several cases, such as: R (17) charged under Article 62 of Law No. 5 of 1997 (psychotropics); T (16) charged under Article 196 and/or 197 of Law No. 36 of 2009 (hard drugs without permission); and L (15) charged under Article 114 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 (Class I narcotics). All cases were handled with a repressive approach, not yet fully in accordance with the principles of restorative justice. Conclusion: The regulation of police authority over child perpetrators of narcotics crimes is clear in Law No. 2 of 2002 and the SPPA Law, emphasizing restorative justice. However, in Kuningan Regency, its implementation has not been optimal, with a dominant repressive approach, and inter-institutional coordination has not been effective. Suggestions: The regulations need to be more widely socialized so that law enforcement officers understand and apply the principles of the SPPA. In implementation, regular training, synergy between institutions, and public legal education through child-care forums at the village level are needed.

Keywords: Police Authority, Children, Narcotics Crimes

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **“Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan”**.

Skripsi Ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Proses penyusunan skripsi ini tentunya memerlukan berbagai kemampuan, informasi atau pengetahuan sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Namun, atas segala bentuk motivasi, bantuan dari berbagai pihak yang memberikan sumbangsihnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak . Gios Adhyaksa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah menuangkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan saran serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat, tercinta, dan yang sangat berjasa, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Kuningan.
2. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si. selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan.
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan.

5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.M. selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan.
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Gios Adhyaksa S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II
11. Dosen dan Staf serta Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut mendukung dalam penulisan ini;
12. Keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.

Kuningan, 24 Juni 2025



MIFTAH PARIDZ

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAKi

ABSTRACTii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Kerangka Teori 5

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13

A. Kepolisian 13

1. Pengertian Kepolisian..... 13

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian 15

B. Tindak Pidana 18

1. Pengertian Tindak Pidana..... 18

2. Unsur Unsur Tindak Pidana 19

3. Macam Macam Tindak Pidana..... 21

C. Tindak Pidana Narkotika 24

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	24
2. Jenis Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	27
3. Mekanisme dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Narkotika.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Spesifikasi Penelitian.....	35
B. Metode Pendekatan.....	35
C. Tahap Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Alat Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data.....	37
G. Lokasi Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengaturan Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan.....	39
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.	39
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ..	42
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	46
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	50
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	54
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	58

B. Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan..	65
1. Pengaturan Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan	66
2. Penerapan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan	73
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	85